

II. LANDASAN TEORI

1. *Good Governance*

Menurut Koiman (2009:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini *good governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut OECD dan World Bank (Sedarmayanti, 2009:273), *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan

demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta pendiptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Menurut Rochman (2009:276) *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif. Menurut dokumen *United Nation Development Program* (UNDP: 2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat“.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* merupakan tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab baru akan

tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi ketiga komponen *good governance* tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang subur apabila prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dengan baik. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) adalah sebagai berikut :

1) Partisipasi

Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2) Kepastian Hukum (*Rule Of Law*)

Kerangka aturan hukum dan prundang-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh (*impartialy*), terutama tentang aturan hukum dan hak azasi manusia.

3) Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

4) Tanggung Jawab (*Responsiveness*)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

5) Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6) Berkeadilan (*Equity*)

Pemerintah yang Baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7) Efektifitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

8) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada public sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholder*).

9) Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2009:289).

2.1. Pengertian Transparansi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri (2002), menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses

atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut *Transparency International*, undang-undang *Freedom of Information* (FOI) bukan hanya mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi tetapi juga menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut. Krina (2003: 19).

2.1.1. Indikator Transparansi

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah (Sedarmayanti, 2009:289).

Tabel 1. Indikator Prinsip Transparansi

Dimensi	No	Indikator
Transparansi (<i>Transparency</i>)	1	Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
	2	Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.
	3	Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
	4	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
	5	Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Sumber: Sedarmayanti (2007:22)

2.2. Pengertian Partisipasi

Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam pengambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga dilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan dimaksud bukan dalam prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat melalui wakil di DPR, melainkan keterlibatan secara langsung. Partisipasi dalam arti mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Terutama member kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan (Sedarmayanti, 2009:290).

Partisipasi berarti bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Dari uraian tersebut, dapat ditarik suatu

pengertian bahwa partisipasi yang sering juga disebut peran serta atau ikut serta masyarakat, diartikan sebagai adanya motivasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi hingga pengembangan atau perluasannya.

2.2.1. Indikator Partisipasi

Oleh karena partisipasi merupakan prinsip mendasar dari *good governance*, maka perlu ditetapkan indikator dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Tabel 2. Indikator Prinsip Partisipasi

Dimensi	No	Indikator
Partisipasi (<i>Participation</i>)	1	Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses atau metode partisipatif.
	2	Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama.
	3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah.
	4	Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Sumber: Sedarmayanti (2007:16-22).

2.3. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011: 89). Selanjutnya, dalam Sedarmayanti (2009:289), akuntabilitas yakni adanya

pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (*stakeholder*). Khusus dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi, dan perusakan sumberdaya, serta transparansi manajemen keuangan, pengadaan, akunting, dan dari pengumpulan sumber daya. Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan-perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan.

Prinsip akuntabilitas menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pertanggungjawaban kepada masyarakat disamping merupakan kewajiban adalah juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan UUD 1945. Prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan dan hasil akhir yang dicapai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi yang lengkap. Keharusan menerapkan konsep ini mengingat kegiatan pemerintah mempunyai pengaruh (dampak) besar dan juga karena kegiatan pemerintah dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.1. Indikator Akuntabilitas

Oleh karena *good governance* berpegang pada akuntabilitas, maka perlu ditetapkan indikator dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Tabel 3. Indikator Prinsip Akuntabilitas

Dimensi	No	Indikator
Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	1	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
	2	Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
	3	Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	4	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah
	5	Berkurangnya kasus-kasus KKN

Sumber: Sedarmayanti (2007:23)

Prinsip-prinsip tersebut merupakan suatu karakteristik yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *Good Governance* yang berkaitan dengan kontrol dan pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan mencapai hasil yang dikehendaki *stakeholders*. Penerapan *Good Governance* kepada pemerintah merupakan mandat, wewenang, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian *Good Governance* adalah membangun pemerintahan yang professional dan mempunyai ilmu pengetahuan sehingga mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan tersebut menjadi skill dan berlandaskan etika dan moralitas yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti

melihat penerapan prinsip-prinsip *good governance* tersebut dalam meningkatkan efektivitas kinerja pegawai khususnya di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

3. Efektivitas Kinerja

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu "*effective*" artinya berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Jadi efektivitas adalah baik dan berhasil. Seseorang dapat bekerja dengan baik maka ia dapat dikatakan bekerja dengan efektif.

Menurut Amin Tunggal Widjaya (1992:32), efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan, melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan". Menurut Sondang P. Siagian (2005 : 24) memberikan definisi sebagai berikut : "Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kinerja semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang menggambarkan keberhasilan kerja yang ditetapkan.

Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2000: 67) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Robins (2001), kinerja merupakan suatu hasil yang harus dicapai oleh pekerja dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa kinerja organisasi mensyaratkan strategi, lingkungan, teknologi, dan budaya organisasi bersatu. Kinerja karyawan adalah sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi.

Jadi kinerja adalah penampilan hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada pejabat fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran pegawai di dalam organisasi. Kinerja dapat dinilai berdasarkan tujuan, ukuran dan penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberi arah dan memengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap pegawai. Namun tujuan saja tidak cukup dalam penilaian kinerja sehingga diperlukan ukuran, apakah seseorang telah mencapai kinerja yang diharapkan sesuai dengan kuantitatif dan kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan yang memegang peranan penting dalam suatu lembaga.

Jadi, efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai yang telah diharapkan, artinya pelaksanaan suatu tugas dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu mempertimbangkan waktu, biaya, sarana dan prasarana. Efektivitas kinerja dalam organisasi merupakan usaha untuk mencapai prestasi yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dalam waktu yang relatif singkat tanpa menunggu keseimbangan tujuan alat dan tenaga serta waktu.

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas kerja lebih ditekankan pada waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan, dan tingkat kedisiplinan pegawai untuk datang ke kantor UPT.

3.1 Indikator Efektivitas Kerja

Pada hakekatnya efektifitas kinerja digunakan untuk mengukur hasil pekerjaan yang dicapai sesuai dengan rencana guna mencapai tujuan. Nilai efektifitas ditentukan oleh tercapainya tujuan organisasi dan nilainya disesuaikan dengan tugas atau pekerjaan dari masing-masing organisasi atau lembaga. Jadi Efektifitas kinerja pada tiap-tiap organisasi akan berbeda-beda antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya, tergantung pada jenis dan sifat dari organisasi yang bersangkutan.

Menurut campel yang dikutip Richard M, Steers (1998:45) untuk mengukur Efektifitas kinerja ada beberapa variabel yang biasa dipergunakan yaitu

1. Kesiagaan

Penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa organisasi mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus jika diminta.

2. Kemangkiran

Frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan pada saat jam kerja.

3. Motivasi

Kecenderungan seseorang individu melibatkan diri dalam kegiatan berarahkan sasaran dalam pekerjaan. Ini bukanlah perasaan senang yang relatif terhadap hasil berbagai pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.

4. Kepuasan kerja

Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka merasa dihargai karena pekerjaan mereka.

5. Beban Pekerjaan

Beban pekerjaan yang diberikan pimpinan kepada bawahan sesuai dengan kemampuan seseorang dan sesuai dengan jumlah kelompok mereka.

6. Waktu menyelesaikan tugas

Waktu merupakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat penting sebab dapat dilihat apakah waktu yang digunakan suatu organisasi sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh setiap anggota berorganisasi.

Tabel 4. Efektivitas Kinerja Pegawai

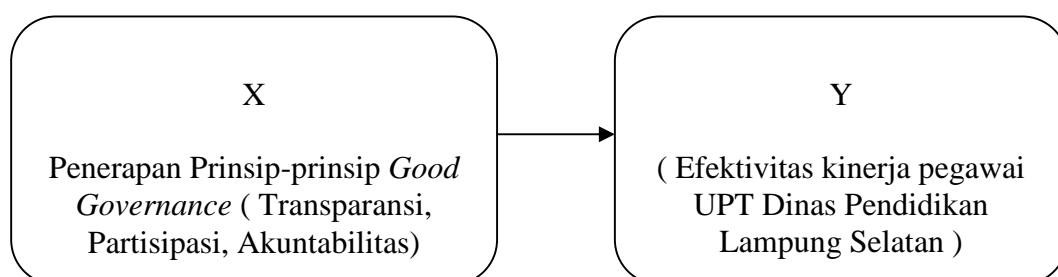
Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas	Efektivitas kerja	Kesiagaan	<ul style="list-style-type: none"> Bersedia menyelesaikan tugas khusus yang bersifat spontan
		Kemangkiran	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pekerja yang bolos saat jam kerja Tidak mengerjakan pekerjaan tepat waktu
		Motivasi	<ul style="list-style-type: none"> adanya semangat kerja rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan
		Kepuasan kerja	<ul style="list-style-type: none"> adanya perasaan puas tentang hasil yang dicapai adanya penghargaan untuk mencapai kepuasan kerja
		Beban pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> beban pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan individu beban pekerjaan yang sesuai dengan jumlah kelompok
		Waktu menyelesaikan tugas	<ul style="list-style-type: none"> tepat waktu sesuai target kerja

Sumber : Richard M, Steers (1998:45)

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan diperlukan adanya pembagian tugas yang tepat pada setiap pegawai sehingga dapat menjalankan tugas secara efektif. Indikator pengukuran efektifitas kinerja dapat dilakukan berdasarkan banyaknya tugas yang dipikul dan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian akan adanya keseimbangan antara beban kerja dan jumlah pegawai sehingga menghasilkan efektifitas kinerja yang diharapkan.

4. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap efektivitas kinerja pegawai pada sektor pendidikan tahun 2013 di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Bagan 1. Kerangka Pikir

5. Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya atau dapat dikatakan proposisi tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. (M. Zainuddin dan Masyhuri, 2008:136). Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang bersifat

sementara, jika suatu dugaan dapat diterima sebagai suatu kebenaran berarti terbukti dan hipotesis diterima, jika dalam penelitian tersebut tidak membuktikan kebenaran dugaan tersebut maka hipotesis ditolak.

Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, dan hipotesis itu berupa jawaban sementara terhadap rumusan masalah dan hipotesis yang akan di uji ini dinamakan hipotesis kerja, dan sebagai lawannya adalah hipotesis nol jika tidak ada pengaruh antara variabel (X) dengan variabel (Y) berarti negatif, sedangkan hipotesis kerja dinyatakan dalam kalimat positif jika terdapat pengaruh antara variabel (X) dengan variabel (Y) berarti positif jawaban. (M. Zainuddin dan Masyhuri, 2008:147).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka hipotesis di dalam pelaksanaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ho : $= 0$ Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip-prinsip Good Governance sebagai variabel bebas (X), dengan efektivitas kinerja pegawai pada sektor pendidikan sebagai variabel terikat (Y)

Hi : $\neq 0$ Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip-prinsip Good Governance sebagai variabel bebas (X), dengan efektivitas kinerja pegawai pada sektor pendidikan sebagai variabel terikat (Y)